

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BPTD WIL. X PROV. JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020. Atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun terdapat beberapa indikator kinerja yang telah berhasil dicapai bahkan melampaui target pembangunan sektor perhubungan. Akhir kata, saya selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 ini.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta



EKO AGUS SUSANTO



# BAB 1 PENDAHULUAN

# **BAB I – PENDAHULUAN**

## **I.1. Latar Belakang**

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

Hal ini merupakan salah satu kriteria untuk instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun 2020-2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib menyusun dan melaporkan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

## I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat pada Tahun 2021 membawahi 39 (tiga puluh sembilan) unit satuan pelayanan yang terdiri dari 20 (dua puluh) unit satuan pelayanan Terminal Tipe A (TTA), 17 (tujuh belas) unit satuan pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 2 (dua) unit Pelabuhan Penyeberangan Perintis, yaitu:

| No | Satuan Pelayanan        | Satuan Pelayanan     | Satuan Pelayanan                        |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
|    | Terminal Tipe A         | UPPKB                | Pelabuhan Penyeberangan Perintis;       |
| 1  | TTA Tirtonadi;          | UPPKB Selogiri;      | Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kendal |
| 2  | TTA Ir. Soekarno;       | UPPKB Toyogo;        | Pelabuhan Penyeberangan Perintis Jepara |
| 3  | TTA Bobotsari;          | UPPKB Pringsurat;    |                                         |
| 4  | TTA Bangga Bangun Desa; | UPPKB Salam;         |                                         |
| 5  | TTA Tingkir;            | UPPKB Gubug;         |                                         |
| 6  | TTA Pemalang;           | UPPKB Lebuawu;       |                                         |
| 7  | TTA Jati;               | UPPKB Sambong;       |                                         |
| 8  | TTA Dhaksinarga;        | UPPKB Ajibarang;     |                                         |
| 9  | TTA Pekalongan;         | UPPKB Kalitirto;     |                                         |
| 10 | TTA Kebumen;            | UPPKB Wanareja;      |                                         |
| 11 | TTA Giri Adi Pura;      | UPPKB Subah;         |                                         |
| 12 | TTA Tidar;              | UPPKB Kulwaru;       |                                         |
| 13 | TTA Mangkang;           | UPPKB Taman Martani; |                                         |
| 14 | TTA Bawen;              | UPPKB Banyudono;     |                                         |



| No | Satuan Pelayanan | Satuan Pelayanan | Satuan Pelayanan                  |
|----|------------------|------------------|-----------------------------------|
|    | Terminal Tipe A  | UPPKB            | Pelabuhan Penyeberangan Perintis; |
| 15 | TTA Cepu;        | UPPKB Klepu;     |                                   |
| 16 | TTA Mendolo;     | UPPKB Sarang;    |                                   |
| 17 | TTA Bulupitu;    | UPPKB Tanjung    |                                   |
| 18 | TTA Purworejo;   |                  |                                   |
| 19 | TTA Giwangan;    |                  |                                   |
| 20 | TTA Tegal;       |                  |                                   |

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan prasarana transportasi jalan, transportasi sungai danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan perintis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial, dan pelabuhan perintis, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan perintis, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan perintis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan.

Bagan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, subbagian, satuan pelaksana, dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan perintis.

e. Satuan Pelayanan

Mempunyai tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### I.3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menaungi sebanyak 1.487 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 105 Pegawai, terdiri dari 20 Terminal Tipe A, 17 UPPKB, dan 2 Pelabuhan Penyeberangan Perintis.

| No  | Unit Kerja              |                |
|-----|-------------------------|----------------|
|     | Terminal Tipe A         | Jumlah Pegawai |
| 1.  | TTA Tirtonadi;          | 180            |
| 2.  | TTA Ir. Soekarno;       | 76             |
| 3.  | TTA Bobotsari;          | 37             |
| 4.  | TTA Bangga Bangun Desa; | 41             |
| 5.  | TTA Tingkir;            | 45             |
| 6.  | TTA Pemalang;           | 63             |
| 7.  | TTA Jati;               | 34             |
| 8.  | TTA Dhaksinarga;        | 37             |
| 9.  | TTA Pekalongan;         | 40             |
| 10. | TTA Kebumen;            | 44             |
| 11. | TTA Giri Adi Pura;      | 50             |

| No  | Unit Kerja      |                |
|-----|-----------------|----------------|
|     | Terminal Tipe A | Jumlah Pegawai |
| 12. | TTA Tidar;      | 38             |
| 13. | TTA Mangkang;   | 50             |
| 14. | TTA Bawen;      | 42             |
| 15. | TTA Cepu;       | 25             |
| 16. | TTA Mendolo;    | 32             |
| 17. | TTA Bulupitu;   | 75             |
| 18. | TTA Purworejo;  | 40             |
| 19. | TTA Giwangan;   | 99             |
| 20. | TTA Tegal.      | 60             |

| No | Unit Kerja           |                |
|----|----------------------|----------------|
|    | UPPKB                | Jumlah Pegawai |
| 1  | UPPKB Selogiri;      | 1              |
| 2  | UPPKB Toyogo;        | 1              |
| 3  | UPPKB Pringsurat;    | 1              |
| 4  | UPPKB Salam;         | 2              |
| 5  | UPPKB Gubug;         | 3              |
| 6  | UPPKB Lebuawu;       | 1              |
| 7  | UPPKB Sambong;       | 1              |
| 8  | UPPKB Ajibarang;     | 24             |
| 9  | UPPKB Kalitirto;     | 26             |
| 10 | UPPKB Wanareja;      | 15             |
| 11 | UPPKB Subah;         | 30             |
| 12 | UPPKB Kulwaru;       | 32             |
| 13 | UPPKB Taman Martani; | 22             |
| 14 | UPPKB Banyudono;     | 31             |
| 15 | UPPKB Klepu;         | 24             |
| 16 | UPPKB Sarang;        | 28             |
| 17 | UPPKB Tanjung.       | 21             |

| No | Unit Kerja                               |                |
|----|------------------------------------------|----------------|
|    | Pelabuhan Penyeberangan Perintis         | Jumlah Pegawai |
| 1  | Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kendal; | 1              |
| 2  | Pelabuhan Penyeberangan Perintis Jepara. | 1              |

## **I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan**

### **1.4.1 Potensi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat

disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

#### **1.4.2 Isu Strategis**

- a. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;

6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

b. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun ke depan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

### **1.4.3 Permasalahan**

a. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan



1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari:
  - a) Pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum semua optimal dikarenakan belum semua UPPKB beroperasi;
  - b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
  - c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
    - 1) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
    - 2) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb.
  - d) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
    - 1) Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
    - 2) Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- 3) Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
  - 4) Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalisme aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
- b. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
1. Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
  2. Belum tersusun data sarana prasarana transportasi penyeberangan;
  3. Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
  4. Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi serta pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota;
  5. Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- c. Permasalahan Transportasi Perkotaan
1. Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
  2. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan

transportasi perkotaan;

3. Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
4. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
5. Kemacetan lalu lintas;
6. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
7. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

d. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

e. Permasalahan Ketatausahaan

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus seperti Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS di Satuan Pelayanan Terminal dan UPPKB Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan secara teknis dan administrasi mengingat wilayah kerja yang cukup luas.

### **I.5. Sistematika Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja
- I.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5. Sistematika Laporan

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
  - III.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target PK Tahun 2020
  - III.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020-2024
  - III.2.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2020
- III.3. Kontribusi Balai Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- III.4. Realisasi Anggaran
  - III.4.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2020

III.4.2 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.4.3 Hambatan dan Kendala

#### **BAB IV PENUTUP**

IV.1 Kesimpulan dan Saran

#### **LAMPIRAN**

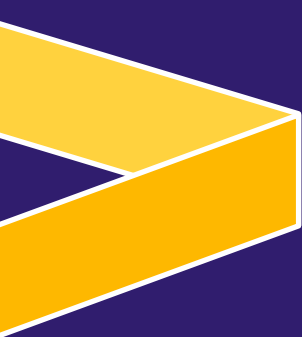
Lampiran I. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran II. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Lampiran III. Rencana Aksi Tahun 2020

# BAB 2 PERENCANAAN KINERJA





## **II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Darat Tahun 2021, sebagaimana tabel berikutini:

**Tabel II.1** Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024 sesuai Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020



| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                             | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                                                                   | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ              |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                            | TW I                | TW II | TW III | TW IV |                 |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                                                           | (4)      | (5)    | (6)                                                                        | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)            |
| 1.  | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPGBK) |          |        |                                                                            |                     |       |        |       |                 |
|     |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Tipe A                                                                                                                                  | Lokasi   | 1      | Pembangunan Terminal Tipe A Kab. Demak Tahap II                            |                     | V     | V      |       | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                       | Lokasi   | 2      | Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pekalongan, Terminal Tipe A Cilacap |                     | V     | V      |       | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                       | Lokasi   | 20     | Fasilitas Operasional Terminal Tipe A                                      | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                             | Lokasi   | 10     | Fasilitas Jembatan Timbang                                                 | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPGBK)             | Kegiatan |        |                                                                            |                     |       |        |       |                 |

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                       | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                                                                                        | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ              |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|     |                          |                                                                                                                                                         |          |        |                                                                                                 | TW I                | TW II | TW III | TW IV |                 |
| (1) | (2)                      | (3)                                                                                                                                                     | (4)      | (5)    | (6)                                                                                             | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)            |
|     |                          | 3. Terlaksanakannya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan 2024                                                 | Lokasi   | 0      |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                                                            |          |        |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                            | Lokasi   | 0      |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | 4. Tersusunnya evaluasi kalinrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri | Kota/Kab | 39     | Monitoring Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                          | a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan                                                                                       |          |        |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor                                                       | Kegiatan | 1      | Monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                          | a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                                                              |          |        |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | SATUAN   | TARGET   | KEGIATAN                                    | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ          |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
|     |                          |                                                                                                                                      |          |          |                                             | TW I                | TW II | TW III | TW IV |             |
| (1) | (2)                      | (3)                                                                                                                                  | (4)      | (5)      | (6)                                         | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)        |
|     |                          | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan | M2       | 5.570.04 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | a. Jumlah Marka Jalan                                                                                                                |          |          |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | b. Jumlah Delineator                                                                                                                 | Unit     | 0        |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                          | Unit     | 265      | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | d. Jumlah APILL                                                                                                                      | Unit     | 16       | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                                      | Unit     | 510      | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | f. Jumlah alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan (Guard Rail)                                                                 | Unit     | 800      | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan                                                | Kegiatan | 2        | Bimtek dan Sosialisasi BPTD                 | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                          | a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                                                                       |          |          |                                             |                     |       |        |       |             |

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                             | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                                    | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                               |          |        |                                             | TW I                | TW II | TW III | TW IV |             |
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                           | (4)      | (5)    | (6)                                         | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)        |
|     |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan | Lintas   | 0      |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                                                                                          | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                              |          |        |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                              | Lintas   | 1      |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                                                                                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                      | Kegiatan | 1      | Monitoring dan Pengawasan TSDP              | V                   | V     | V      | V     | Kasi ASDP   |
| 2.  | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor          | Bulan    | 12     | Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi         | V                   | V     | V      | V     |             |
|     |                                                                                          | a. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran                                                                       |          |        |                                             |                     |       |        |       | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | b. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan                                                                         | Bulan    | 14     | Pembayaran Gaji dan Tunjangan               | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A                      | Laporan  | 3      | Penyusunan Bahan Rencana Kerja dan Anggaran | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                                      |          |        |                                             |                     |       |        |       |             |

| No  | SASARAN<br>PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                            | SATUAN  | TARGET | KEGIATAN                                         | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ             |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|----------------|
|     |                             |                                                              |         |        |                                                  | TW I                | TW II | TW III | TW IV |                |
| (1) | (2)                         | (3)                                                          | (4)     | (5)    | (6)                                              | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)           |
|     |                             | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD | Laporan | 4      | Penyusunan SAKIP, SPIP, Laptah, dan Ptofile BPTD | V                   |       |        | V     | Kasubbag<br>TU |

## II.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 terdiri dari Indikator Kinerja guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2** Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                              | SATUAN | TARGET |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                                   | ( 3 )                                                                                                                                                                          | ( 4 )  | ( 5 )  |
| 1.    | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) |        |        |
|       |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                         | Lokasi | 1      |
|       |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                        | Lokasi | 1      |
|       |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                        | Lokasi | 20     |
|       |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                              | Lokasi | 10     |

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                             | SATUAN           | TARGET    |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| ( 1 ) | ( 2 )                     | ( 3 )                                                                                                                                                                                                                         | ( 4 )            | ( 5 )     |
|       |                           | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )                                                            | <b>Kegiatan</b>  | <b>1</b>  |
|       |                           | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS,RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024<br>a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                    | <b>Lokasi</b>    | <b>0</b>  |
|       |                           | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                                                                                                  | <b>Lokasi</b>    | <b>0</b>  |
|       |                           | 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri.<br>a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan | <b>Kota/ Kab</b> | <b>38</b> |
|       |                           | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor<br>a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                               | <b>Kegiatan</b>  | <b>1</b>  |

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | SATUAN         | TARGET   |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                 | ( 3 )                                                                                                                                | ( 4 )          | ( 5 )    |
|       |                                       | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan |                |          |
|       |                                       | a. Jumlah marka jalan                                                                                                                | M <sup>2</sup> | 8,950,38 |
|       |                                       | b. Jumlah Delineator                                                                                                                 | Unit           | 150      |
|       |                                       | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                          | Unit           | 519      |
|       |                                       | d. Jumlah APILL                                                                                                                      | Unit           | 21       |
|       |                                       | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                                      | Unit           | 1010     |
|       |                                       | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ( <i>Guard Rail</i> )                                                          | Unit           | 0        |
|       |                                       | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan                                                |                |          |
|       |                                       | a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                                                                       | Kegiatan       | 2        |
|       |                                       | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan      |                |          |
|       |                                       | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                                     | Lintas         | 0        |
|       |                                       | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                                     | Lintas         | 1        |
|       |                                       | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                             | Kegiatan       | 1        |
| 2.    | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga,                                                       |                |          |



| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | SATUAN  | TARGET |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                              | ( 3 )                                                                                                    | ( 4 )   | ( 5 )  |
|       | Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor                                                                    |         |        |
|       |                                                    | a. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran                                                  | Bulan   | 12     |
|       |                                                    | b. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan                                                    | Bulan   | 14     |
|       |                                                    | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A |         |        |
|       |                                                    | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                 | Laporan | 1      |
|       |                                                    | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                             | Laporan | 4      |

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. **113.388.005.000,-** adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3** Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                              | SATUAN   | TARGET |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                                   | ( 3 )                                                                                                                                                                          | ( 4 )    | ( 5 )  |
| 1.    | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) |          |        |
|       |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                         | Lokasi   | 1      |
|       |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                        | Lokasi   | 2      |
|       |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                        | Lokasi   | 20     |
|       |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                              | Lokasi   | 10     |
|       |                                                         | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )             | Kegiatan | 1      |
|       |                                                         | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024                                                                    |          |        |
|       |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                                                                                   | Lokasi   | 0      |
|       |                                                         | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                                                   | Lokasi   | 0      |

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN         | TARGET   |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| ( 1 ) | ( 2 )                     | ( 3 )                                                                                                                                                                                                                                    | ( 4 )          | ( 5 )    |
|       |                           | <p>4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri.</p> <p>a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan</p> | Kota/Kab       | 38       |
|       |                           | <p>5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor</p> <p>a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat</p>                                               | Kegiatan       | 1        |
|       |                           | <p>6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>a. Jumlah marka jalan</p>                                                                 | M <sup>2</sup> | 8.950,38 |
|       |                           | b. Jumlah Patok Tikungan / Delineator                                                                                                                                                                                                    | Unit           | 150      |
|       |                           | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                              | Unit           | 519      |
|       |                           | d. Jumlah APILL                                                                                                                                                                                                                          | Unit           | 21       |
|       |                           | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                                                                                                                                          | Unit           | 1010     |
|       |                           | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ( Guard Rail )                                                                                                                                                                     | Unit           | 0        |

| NO        | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                   | SATUAN          | TARGET    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| ( 1 )     | ( 2 )                                                                                    | ( 3 )                                                                                                                                                                               | ( 4 )           | ( 5 )     |
|           |                                                                                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan<br>a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                             | <b>Kegiatan</b> | <b>2</b>  |
|           |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan<br>a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil | <b>Lintas</b>   | <b>0</b>  |
|           |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                                                                                    | <b>Lintas</b>   | <b>1</b>  |
|           |                                                                                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                                                                            | <b>Kegiatan</b> | <b>1</b>  |
| <b>2.</b> | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor<br>a. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran     | <b>Bulan</b>    | <b>12</b> |
|           |                                                                                          | b. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan                                                                                                                               | <b>Bulan</b>    | <b>14</b> |
|           |                                                                                          | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A<br>a. Tersusunnya Bahan RKA                                                | <b>Laporan</b>  | <b>1</b>  |
|           |                                                                                          | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                                                                                                        | <b>Laporan</b>  | <b>4</b>  |



# BAB 3

# AKUNTABILITAS

# KINERJA

### III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya

Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-Performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola data dan laporan kinerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

#### **Metode Pengukuran**

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

### Indikator Kinerja Utama:

1. Prosentase pengukuran IKU (Unit)
  - a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Realisasi a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ a IKU (Unit)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \text{ a IKU (Unit)}}{\text{Rencana atau target a IKU (Unit)}} \times 100 \%$$

2. Rata-rata nilai capaian IKU terhadap Sasaran (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

3. Rata-rata nilai capaian seluruh IKU yang dilaksanakan (Unit)

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IKU (Unit) dalam a Sasaran}}{\text{Total jumlah rencana IKU (Unit) dalam a Sasaran}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020  
Hasil pengukuran kinerja Di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan pendanaan. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                             | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                                                                   | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ              |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                               |          |        |                                                                            | TW I                | TW II | TW III | TW IV |                 |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                                                           | (4)      | (5)    | (6)                                                                        | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)            |
| 1.  | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPBKB) |          |        |                                                                            |                     |       |        |       |                 |
|     |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Tipe A                                                                                                                                  | Lokasi   | 1      | Pembangunan Terminal Tipe A Kab. Demak Tahap II                            |                     | V     | V      |       | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                       | Lokasi   | 2      | Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pekalongan, Terminal Tipe A Cilacap |                     | V     | V      |       | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                       | Lokasi   | 20     | Fasilitas Operasional Terminal Tipe A                                      | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                             | Lokasi   | 10     | Fasilitas Jembatan Timbang                                                 | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                                                         | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPBKB)             | Kegiatan |        |                                                                            |                     |       |        |       |                 |
|     |                                                         | 3. Terlaksanakannya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan 2024                                                                       | Lokasi   | 0      |                                                                            |                     |       |        |       |                 |



| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                       | SATUAN   | TARGET   | KEGIATAN                                                                                        | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ              |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|     |                          |                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                 | TW I                | TW II | TW III | TW IV |                 |
| (1) | (2)                      | (3)                                                                                                                                                     | (4)      | (5)      | (6)                                                                                             | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)            |
|     |                          | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                                                            |          |          |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                            | Lokasi   | 0        |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | 4. Tersusunnya evaluasi kalinrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri | Kota/Kab | 39       | Monitoring Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                          | a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan                                                                                       |          |          |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor                                                       | Kegiatan | 1        | Monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                | V                   | V     | V      | V     | Kasi Sarpras TJ |
|     |                          | a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                                                              |          |          |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan                    | M2       | 5.570.04 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan                                                     |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ       |
|     |                          | a. Jumlah Marka Jalan                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |
|     |                          | b. Jumlah Delineator                                                                                                                                    | Unit     | 0        |                                                                                                 |                     |       |        |       |                 |

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                             | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                                    | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ          |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
|     |                          |                                                                                                                               |          |        |                                             | TW I                | TW II | TW III | TW IV |             |
| (1) | (2)                      | (3)                                                                                                                           | (4)      | (5)    | (6)                                         | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)        |
|     |                          | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                   | Unit     | 265    | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | d. Jumlah APILL                                                                                                               | Unit     | 16     | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                               | Unit     | 510    | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | f. Jumlah alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan (Guard Rail)                                                          | Unit     | 800    | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |                     | V     | V      |       | Kasi LLAJ   |
|     |                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan                                         | Kegiatan | 2      | Bimtek dan Sosialisasi BPTD                 | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                          | a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                                                                |          |        |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan | Lintas   | 0      |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                              |          |        |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                              | Lintas   | 1      |                                             |                     |       |        |       |             |
|     |                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                      | Kegiatan | 1      | Monitoring dan Pengawasan TSDP              | V                   | V     | V      | V     | Kasi ASDP   |

| No  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                    | SATUAN  | TARGET | KEGIATAN                                         | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                      |         |        |                                                  | TW I                | TW II | TW III | TW IV |             |
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                  | (4)     | (5)    | (6)                                              | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)        |
| 2.  | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor | Bulan   | 12     | Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi              | V                   | V     | V      | V     |             |
|     |                                                                                          | a. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran                                                              |         |        |                                                  |                     |       |        |       | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | b. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan                                                                | Bulan   | 14     | Pembayaran Gaji dan Tunjangan                    | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A             | Laporan | 3      | Penyusunan Bahan Rencana Kerja dan Anggaran      | V                   | V     | V      | V     | Kasubbag TU |
|     |                                                                                          | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                             |         |        |                                                  |                     |       |        |       |             |
|     |                                                                                          | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                                         | Laporan | 4      | Penyusunan SAKIP, SPIP, Laptah, dan Ptofile BPTD | V                   |       |        | V     | Kasubbag TU |

### III.2.1. Perbandingan Target PK Tahun 2020 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020

Selama tahun 2020, ada 2 Sasaran Strategis dan didalamnya ada 10 Indikator Kinerja (IK) dalam Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.



#### Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat

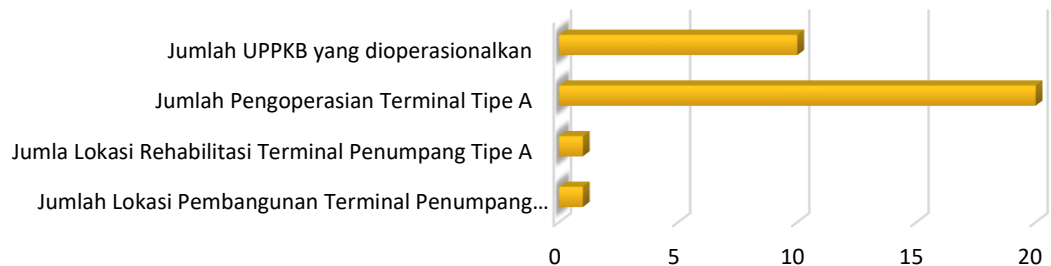
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Pembentukan Organisasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mewujudkan pelayanan transportasi darat handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas

Pencapaian SK 1 diukur melalui 8 ( Delapan ) Indikator Kinerja (IK)  
Yaitu :

IK. 1 : Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Capaian jumlah tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Dapat dilihat pada grafik IK.1 :

### **Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)**

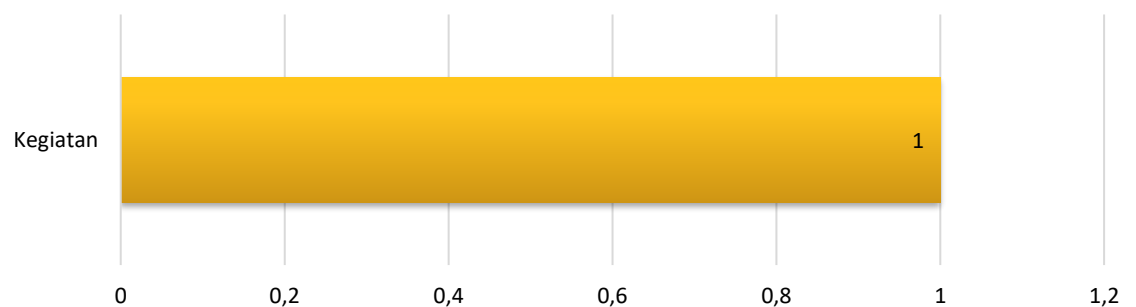


IK. 2 : Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Capaian jumlah tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Dapat dilihat pada grafik IK.2 :

IK.2 Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

### **Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)**



IK. 3 : Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan tahun 2024

Capaian jumlah terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan tahun 2024  
Capaian jumlah Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan tahun 2024  
Dapat dilihat pada grafik IK.3 :

IK.3. Terlaksananya penerapan ZOSS, RASS, dan pembatasan kecepatan/rencana penerapan sampai dengan tahun 2024

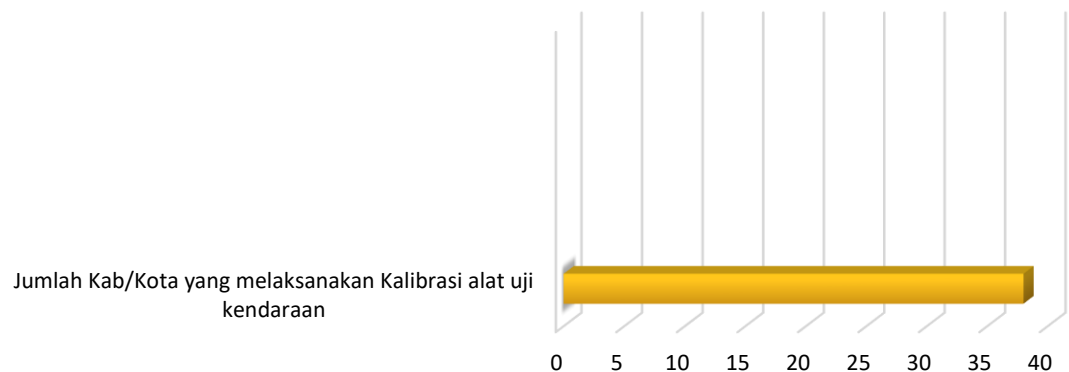


IK. 4 : Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dam industri karoseri

Capaian jumlah Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dam industri karoseri Dapat dilihat pada grafik IK.4 :

IK.4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dam industri karoseri

### Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan

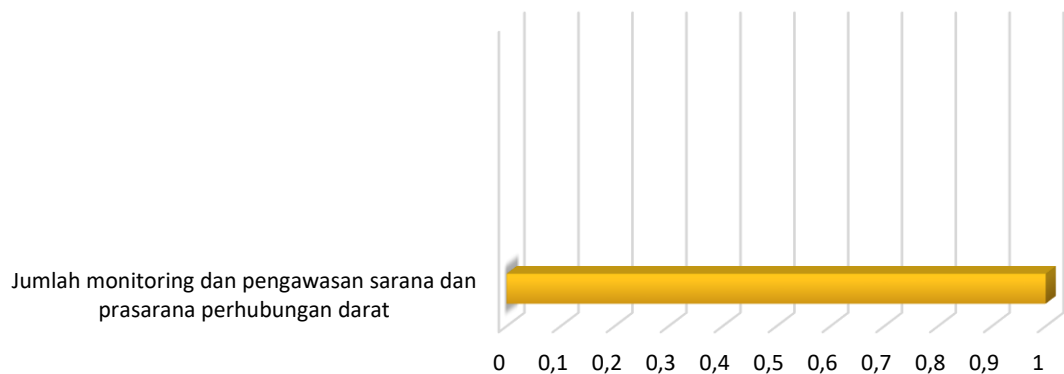


IK. 5 : Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor

Capaian tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor. Dapat dilihat pada grafik IK.5 :

IK.5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor

### Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat



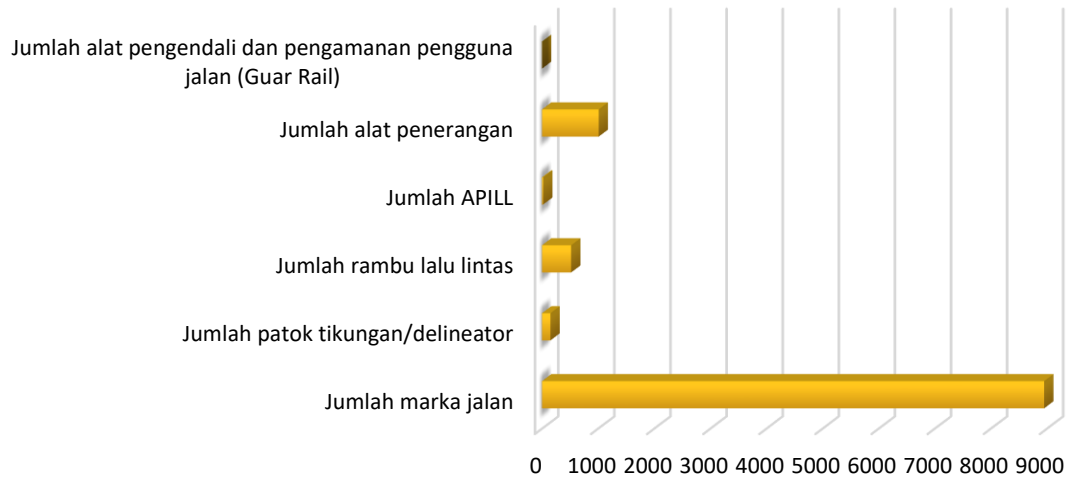
IK. 6 : Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

Capaian tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dilihat pada grafik IK.6 :

IK.6 Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan



## Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

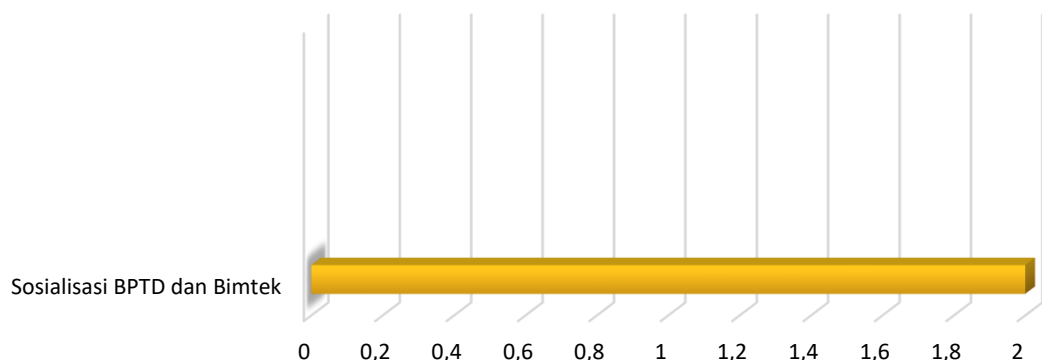


IK. 7 : Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

Capaian terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan. Dapat dilihat pada grafik IK.7 :

IK.7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

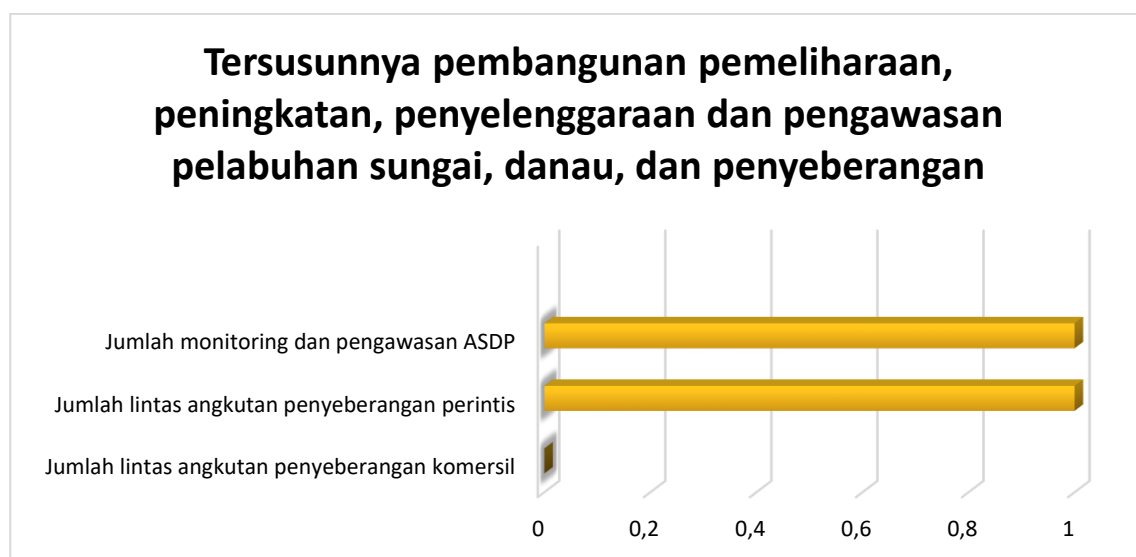
## Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan



IK. 8 : Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

Capaian tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Dapat dilihat pada grafik IK.8 :

IK.8 Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan



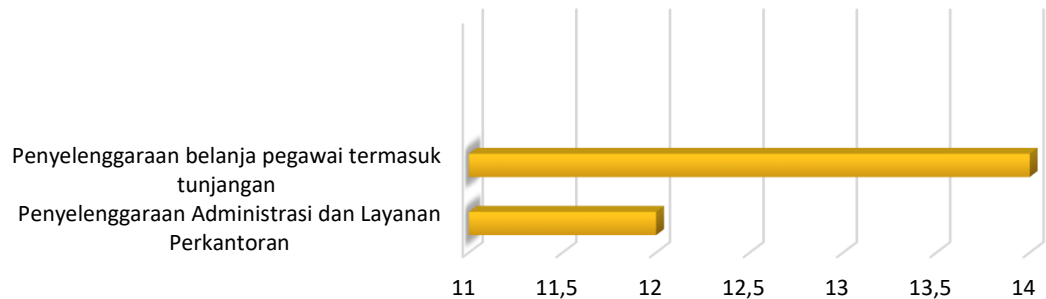
Pencapaian SK 2 diukur melalui 2 ( Dua ) Indikator Kinerja (IK) Yaitu :

IK. 9 : Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor

Capaian Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor). Dapat dilihat pada grafik IK.9 :

IK.9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor

## Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor



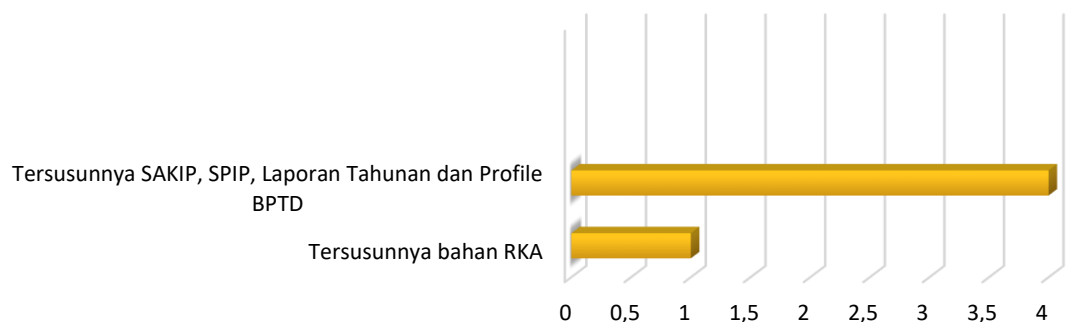
IK. 10 : Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

Capaian tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

. Dapat dilihat pada grafik IK.10 :

IK.10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

## Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A



### III.2.2. PERBANDINGAN TARGET 2020-2024 TERHADAP REALISASI Pada Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis satu yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat.

Berikut dilampirkan perbandingan target tahun 2020-2024 terhadap realisasi tahun 2020-2024 pada sasaran strategis 1 ( satu ) yang terdiri dari 8 ( delapan ) indikator kinerja. Adapun data yang disampaikan berupa table dan grafik perbandingan target dengan realisasi dari tahun 2020-2024.

- IK.1 Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

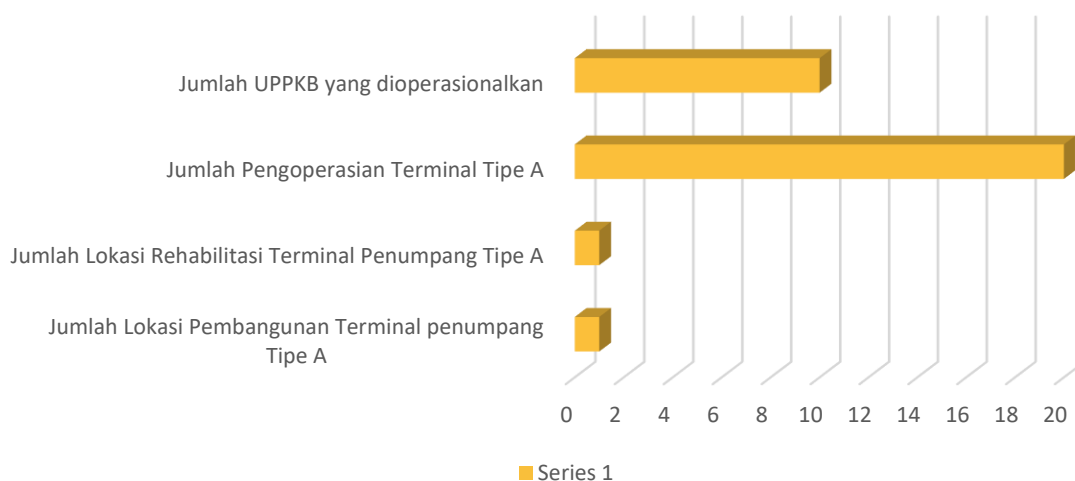
Jumlah pengoperasian Terminal Tipe A

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 20   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 20   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Jumlah UPPKB yang dioperasikan

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 10   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 10   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

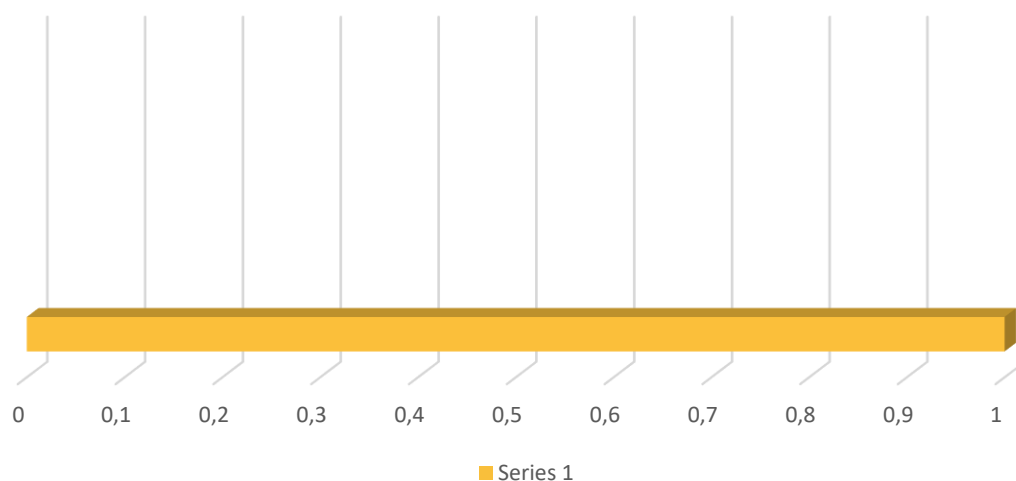
Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)



IK.2 Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Tersusunnya evaluasi pengawasan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)



IK.3 Terlaksanakannya penerapan ZOSS, RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024

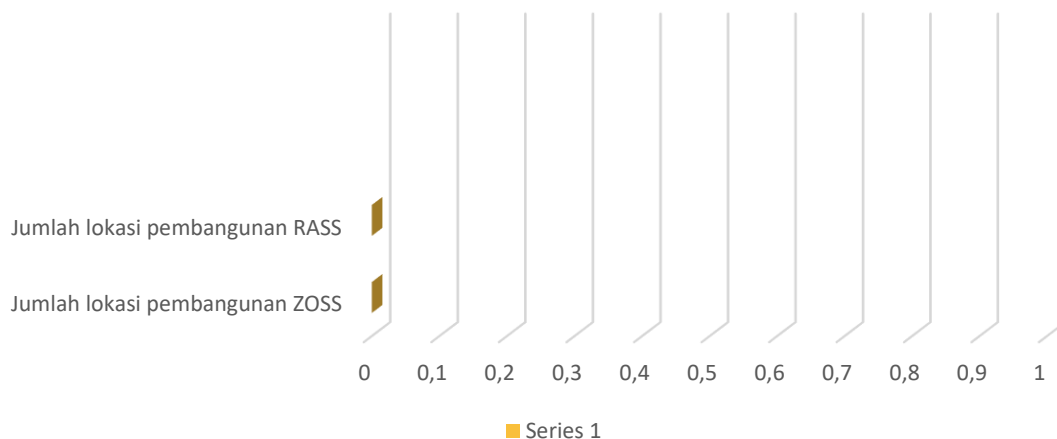
Jumlah lokasi pembangunan ZOSS

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Jumlah lokasi pembangunan RASS

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Terlaksanakannya penerapan ZOSS, RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024

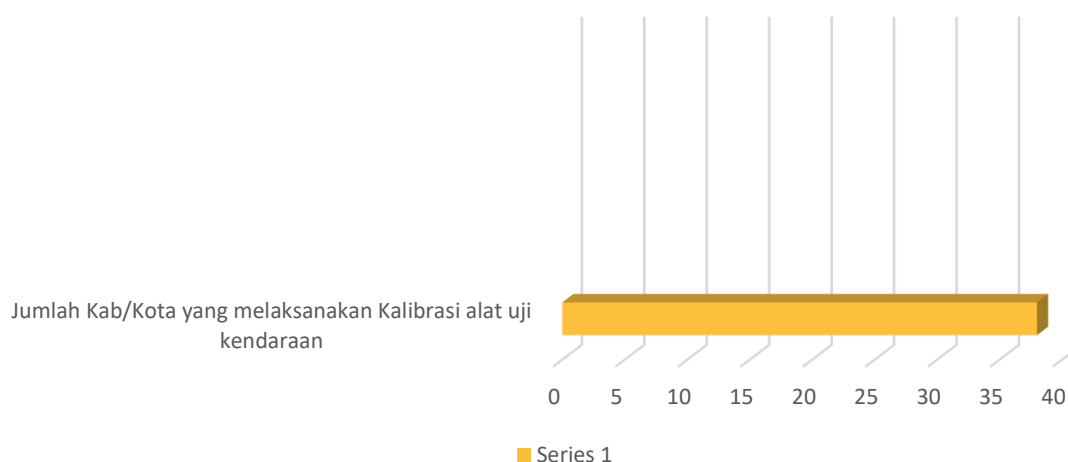


IK.4 Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industry karoseri

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 38   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 38   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

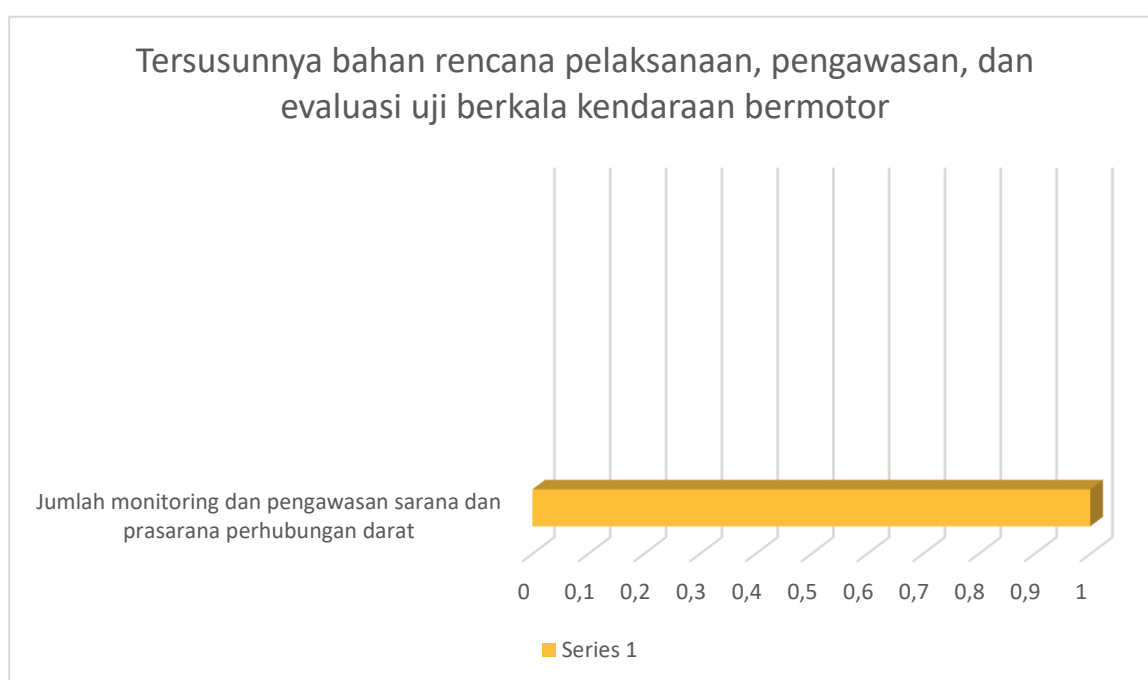
Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industry karoseri



IK.5 Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor

Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



IK.6 Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

Jumlah marka jalan

|                  | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|----------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 8.950,38 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 8.950,38 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100%     | -    | -    | -    | -    |

Jumlah Delineator

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 150  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 150  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



#### Jumlah Rambu Lalu Lintas

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 519  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 519  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

#### Jumlah APILL

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 21   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 21   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

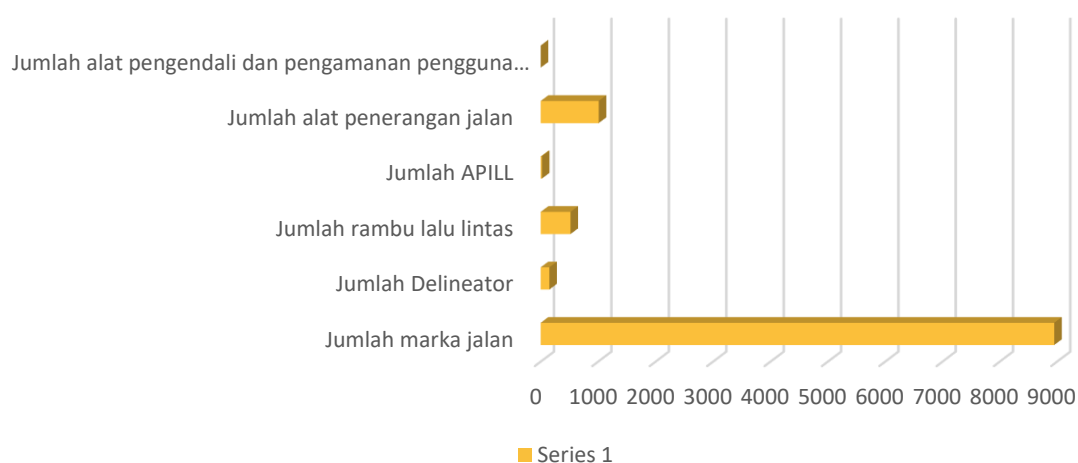
#### Jumlah Alat Penerangan Jalan

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1010 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1010 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

#### Jumlah Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan (*Guard Rail*)

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

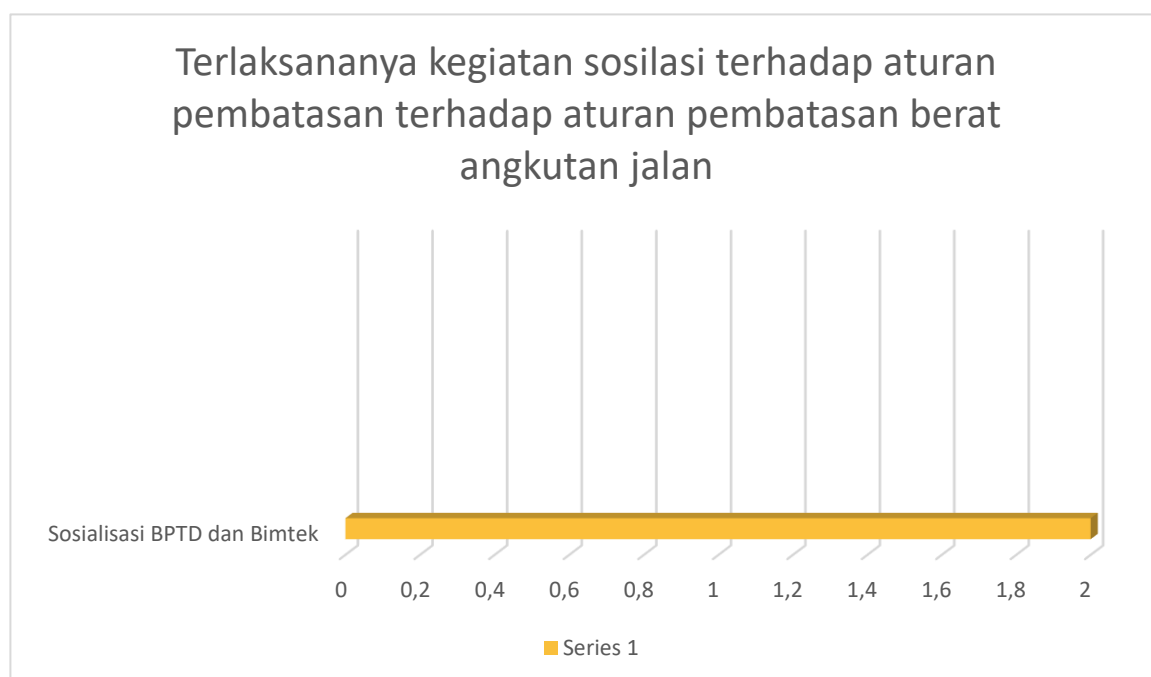
Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan



IK.7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan

Sosialisasi BPTD dan Bimtek

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 2    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 2    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



IK.8 Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan

Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil

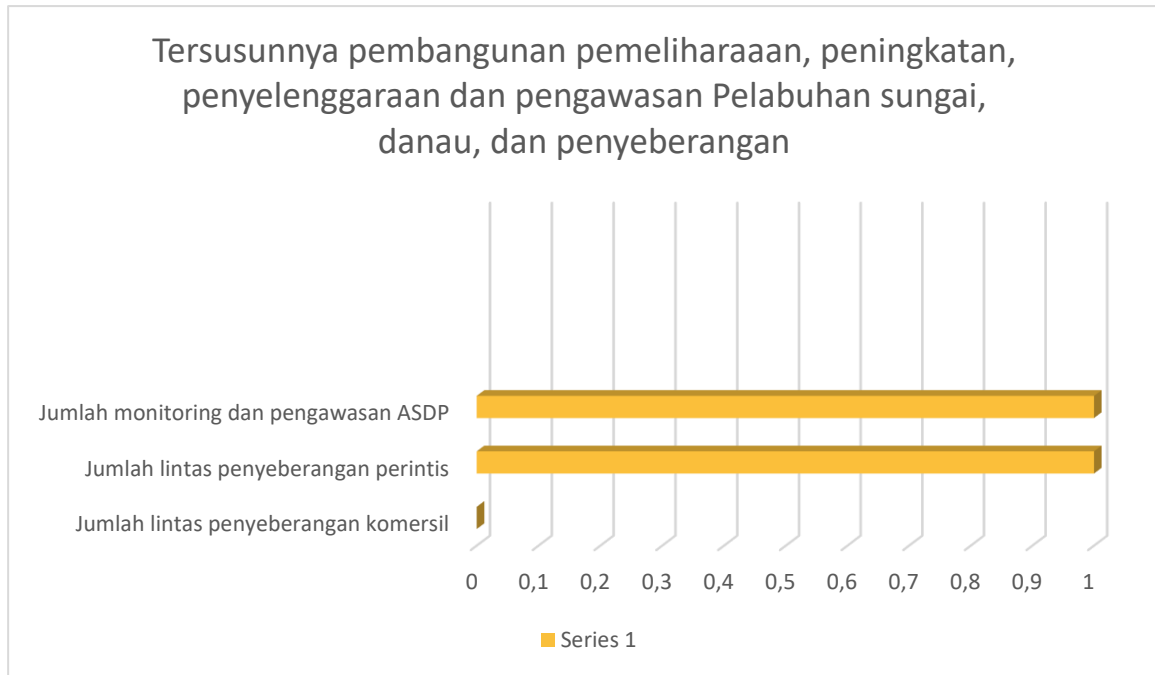
|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 0    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

#### Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



### III.2.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dalam Sasaran strategis satu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat jumlahnya terdiri dari 8 Indikator Kinerja yaitu, Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Terlaksanakannya penerapan ZOSS, RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024, Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industry karoseri, Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor, Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lalu lintas dan angkutan jalan, Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap

aturan pembatasan terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan, Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.



## Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Sasaran strategis dua yaitu Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari 2 Indikator Kinerja, yaitu: Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor, Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

### III.3.1. Perbandingan Target 2020 Terhadap Realisasi 2020

Pencapaian Sasaran Strategis dua diukur melalui 2 Indikator Kinerja ( IK ), Yaitu:

IK.9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor

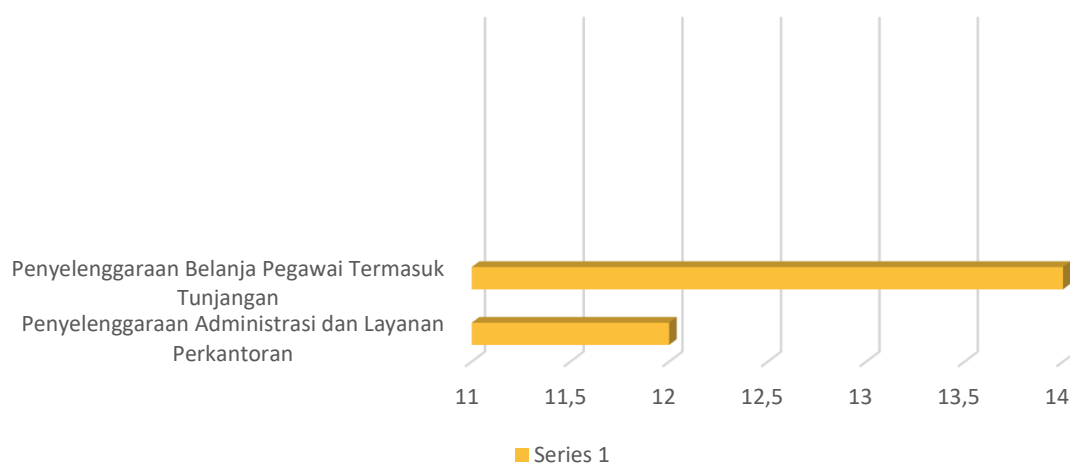
Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 12   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 12   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 14   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 14   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor



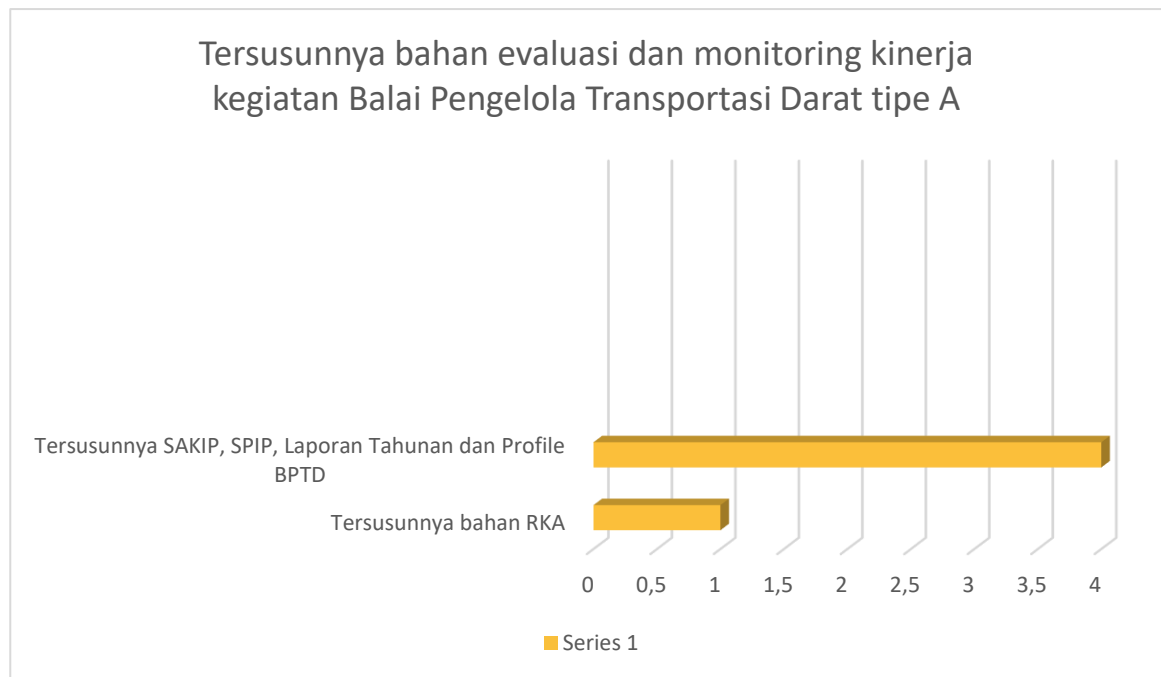
IK.10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

Tersusunnya bahan RKA

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 4    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 4    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



### III.3.2. PERBANDINGAN TARGET TAHUN 2015-2020 TERHADAP REALISASI 2015-2020

Sasaran strategis dua yaitu Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari 2 Indikator Kinerja, yaitu: Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor, Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

Pencapaian Sasaran Strategis dua diukur melalui 2 Indikator Kinerja ( IK ),  
Yaitu:

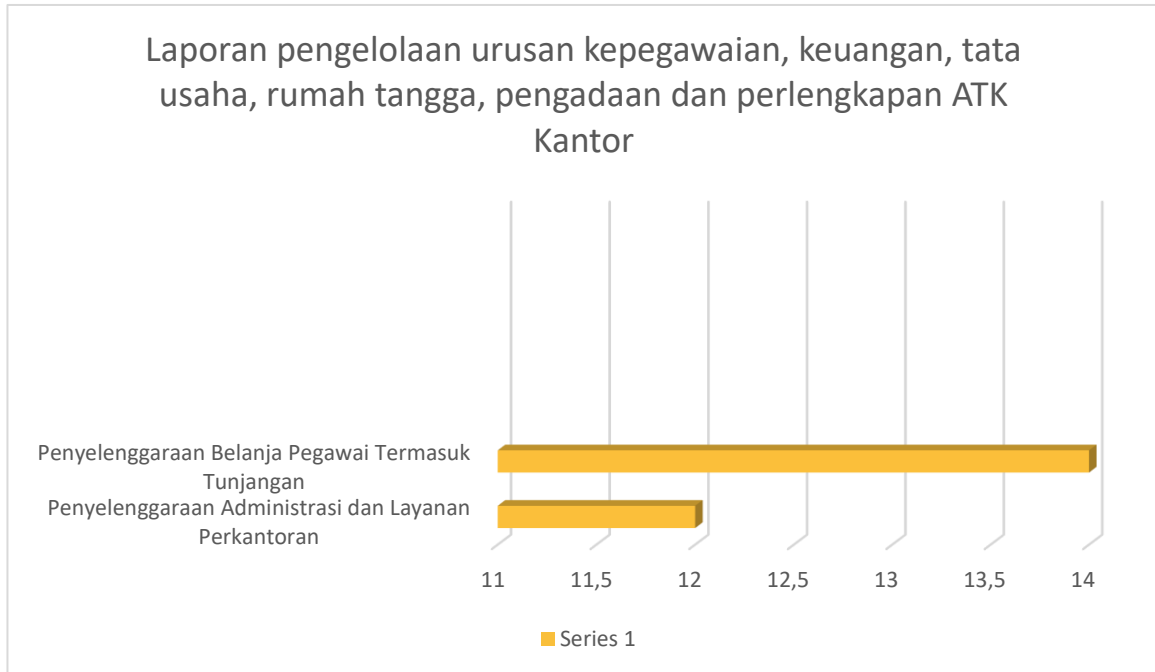
IK.9 Laporan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor

Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 12   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 12   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 14   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 14   | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



IK.10 Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A

Tersusunnya bahan RKA

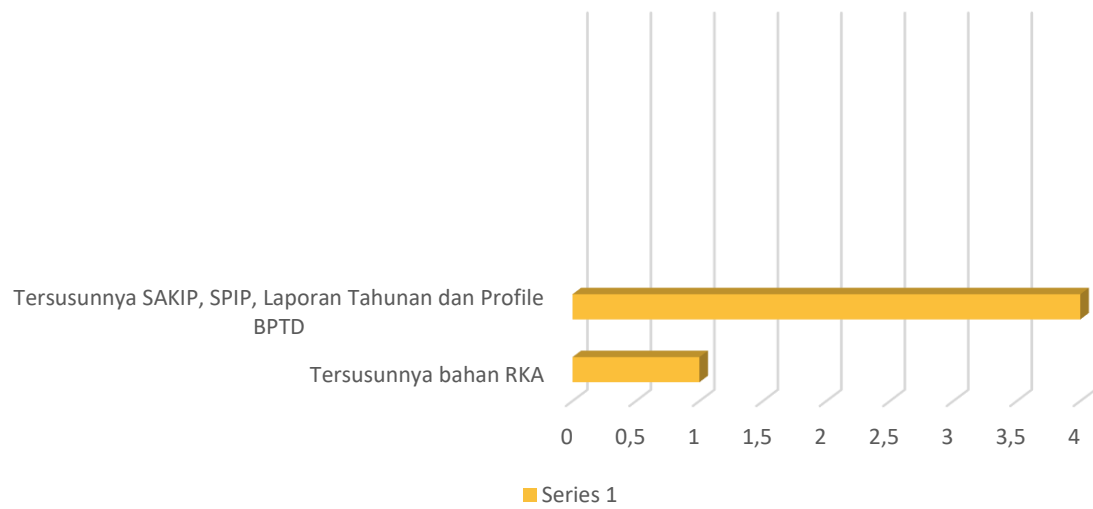
|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 1    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |

Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD

|                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Target</b>    | 4    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Realisasi</b> | 4    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Capaian</b>   | 100% | -    | -    | -    | -    |



### Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A



### **III.3.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Dari sasaran strategis dua ini, terdapat 2 indikator kinerja dan keseluruhan target pada tahun 2020 tercapai 100%, hal ini dapat terjadi karena dukungan dari semua pihak yang telah ikut serta dalam peran aktif di instansi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y. Semangat yang tinggi para pegawai BPTD patut di apresiasi karena semua kegiatan terlaksana dengan baik, oleh karena itu untuk keberhasilan kegiatan, inovasi, kreatifitas tiap pegawai tiap instansi harus terus men-support dari semua aspek agar kedepannya tiap tahun harus lebih baik lagi dan ditingkatkan kinerja dari masing-masing pegawai.

### III.8.1. ANALISIS SUMBER EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Sumber Daya kami sajikan dalam Tabel berikut:

| NO    | Jenis Belanja   | Pagu            | Realisasi Per 31 Desember 2021 |                |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|
|       |                 |                 | Keuangan                       | Prosentase (%) |
| 1     | Belanja Pegawai | 66.840.777.000  | 66.416.963.538                 | 99,37%         |
| 2     | Belanja Barang  | 126.983.833.000 | 124.983.833.000                | 97,82%         |
| 3     | Belanja Modal   | 97.892.429.000  | 97.475.724.629                 | 94,47%         |
| TOTAL |                 | 291.717.039.000 | 283.111.395.377                | 97,05%         |

### III.8.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Utama dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum realisasi anggaran yang rendah dari alokasi atau persentase pencapaian rencana tingkat capaian lebih besar dari 100% menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien. Namun hal ini berlaku jika realisasi keluaran (output) dapat tercapai sesuai target.

### III.8.3. Alokasi Total Anggaran Tahun 2020

#### Alokasi Anggaran Tahun 2020

##### a. Pagu Anggaran

1) Pagu Awal DIPA TA. 2020 sebesar **Rp. 291.717.039.000**

Dengan rincian sebagai berikut:

##### ▪ Rincian per Sumber Dana:

|                     |  |             |                        |          |
|---------------------|--|-------------|------------------------|----------|
| <b>RM</b>           |  | <b>R p.</b> | <b>280.217.039.000</b> | <b>-</b> |
| <b>PNBP</b>         |  | <b>R p.</b> | <b>5.500.000.000</b>   | <b>-</b> |
| <b>PLN</b>          |  | <b>R p.</b> | <b>-</b>               | <b>-</b> |
| <b>SBSN<br/>PBS</b> |  | <b>R p.</b> | <b>6.000.000.000</b>   | <b>-</b> |

##### ▪ Rincian per Jenis Belanja :

|                        |            |                        |          |
|------------------------|------------|------------------------|----------|
| <b>Belanja Pegawai</b> | <b>Rp.</b> | <b>66.840.777.000</b>  | <b>-</b> |
| <b>Belanja Barang</b>  | <b>Rp.</b> | <b>126.983.833.000</b> | <b>-</b> |
| <b>Belanja Modal</b>   | <b>Rp.</b> | <b>97.892.429.000</b>  | <b>-</b> |

### **III.8.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja**

Dana tidak terserap oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 8.605.643.663, Dengan Rincian Sebagai Berikut:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp 423.813.462
2. Sisa belanja barang Rp 2.765.125.830
3. Sisa belanja modal Rp 5.416.704.371

### **III.8.5 Hambatan dan Kendala**

Beberapa Hambatan/Kendala Masih Rendahnya Realisasi Daya Serap Anggaran Antara Lain:

1. Sisa belanja pegawai sebesar Rp 423.813.462 di karenakan banyak pegawai yag pensiun dan meninggal dan uang lembur pegawai tidak terrealisasikan
2. Sisa belanja barang Rp 2.765.125.830 dikarenakan belanja modal yag masuk ke akun belanja barang dan sisa operasional terminal UPPKB dan BPTD
3. Sisa belanja modal Rp 5.416.704.371 berupa nilai kontraktual.



# BAB 4

# PENUTUP



## **IV. Kesimpulan dan Saran**

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.









## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.Y.**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2020

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

**Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE**

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 19620806 198903 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**  
**PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| NO    | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                              | SATUAN   | TARGET |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ( 1 ) | ( 2 )                                                   | ( 3 )                                                                                                                                                                          | ( 4 )    | ( 5 )  |
| 1.    | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) |          |        |
|       |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                         | Lokasi   | 1      |
|       |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                        | Lokasi   | 1      |
|       |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                        | Lokasi   | 20     |
|       |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                              | Lokasi   | 10     |
|       |                                                         | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )             | Kegiatan | 1      |

|  |  |                                                                                                                                                          |                |          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS,RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024                                               |                |          |
|  |  | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                                                             | Lokasi         | 0        |
|  |  | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                             | Lokasi         | 0        |
|  |  | 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri. |                |          |
|  |  | a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan                                                                                        | Kota/Kab       | 38       |
|  |  | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor                                                        |                |          |
|  |  | a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                                                               | Kegiatan       | 1        |
|  |  | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan                     |                |          |
|  |  | a. Jumlah marka jalan                                                                                                                                    | M <sup>2</sup> | 8.950,38 |
|  |  | b. Jumlah Delineator                                                                                                                                     | Unit           | 150      |
|  |  | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                                              | Unit           | 519      |
|  |  | d. Jumlah APILL                                                                                                                                          | Unit           | 21       |

|    |                                                                                          |                                                                                                                               |          |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|    |                                                                                          | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                               | Unit     | 1010 |
|    |                                                                                          | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ( Guard Rail )                                                          | Unit     | 0    |
|    |                                                                                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan                                         |          |      |
|    |                                                                                          | a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                                                                | Kegiatan | 2    |
|    |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai,danau,dan penyeberangan |          |      |
|    |                                                                                          | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                              | Lintas   | 0    |
|    |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                              | Lintas   | 1    |
|    |                                                                                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                      | Kegiatan | 1    |
| 2. | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor            |          |      |
|    |                                                                                          | a. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran                                                                       | Bulan    | 12   |
|    |                                                                                          | b. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan                                                                         | Bulan    | 14   |



|  |  |                                                                                                          |                |          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A |                |          |
|  |  | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                 | <b>Laporan</b> | <b>1</b> |
|  |  | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                             | <b>Laporan</b> | <b>4</b> |

| <b>NO</b>    | <b>KEGIATAN</b>                                                                         | <b>ANGGARAN</b>           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>( 1 )</b> | <b>( 2 )</b>                                                                            | <b>( 3 )</b>              |
| <b>1.</b>    | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan                                             | <b>Rp. 41.975.298.000</b> |
| <b>2.</b>    | Operasionalkan tipe A                                                                   | <b>Rp. 40.007.692.000</b> |
| <b>3.</b>    | Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Tipe A                                            | <b>Rp. 15.000.000.000</b> |
| <b>4.</b>    | Operasional UPPKB                                                                       | <b>Rp. 8.005.015.000</b>  |
| <b>5.</b>    | Pengadaan dan Pemasangan ATCS                                                           | <b>Rp. 5.500.000.000</b>  |
| <b>6.</b>    | Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | <b>Rp. 2.900.000.000</b>  |

Semarang, 20 Januari 2020

**Pihak Kedua**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

**Pihak Pertama**



**Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE**

Pembina Tk. I – IV/b

NIP. 19620806 198903 1 012



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X  
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2020

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**

**Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si**

**EKO AGUS SUSANTO**

Pembina – IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**  
**PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| <b>NO</b>    | <b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>                               | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                                                                                                                              | <b>SATUAN</b>   | <b>TARGET</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>( 1 )</b> | <b>( 2 )</b>                                                   | <b>( 3 )</b>                                                                                                                                                                          | <b>( 4 )</b>    | <b>( 5 )</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat</b> | <b>1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )</b> |                 |               |
|              |                                                                | <b>a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A</b>                                                                                                                         | <b>Lokasi</b>   | <b>1</b>      |
|              |                                                                | <b>b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A</b>                                                                                                                        | <b>Lokasi</b>   | <b>2</b>      |
|              |                                                                | <b>c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A</b>                                                                                                                                        | <b>Lokasi</b>   | <b>20</b>     |
|              |                                                                | <b>d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan</b>                                                                                                                                              | <b>Lokasi</b>   | <b>10</b>     |
|              |                                                                | <b>2. Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )</b>             | <b>Kegiatan</b> | <b>1</b>      |

|  |  |                                                                                                                                                          |                      |            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|  |  | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS,RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024                                               |                      |            |
|  |  | a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                                                             | <b>Lokasi</b>        | <b>0</b>   |
|  |  | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                             | <b>Lokasi</b>        | <b>0</b>   |
|  |  | 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri. |                      |            |
|  |  | a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan                                                                                        | <b>Kota/Kab</b>      | <b>38</b>  |
|  |  | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor                                                        |                      |            |
|  |  | a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                                                               | <b>Kegiatan</b>      | <b>1</b>   |
|  |  | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan, pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan                     |                      |            |
|  |  | a. Jumlah marka jalan                                                                                                                                    | <b>M<sup>2</sup></b> | <b>0</b>   |
|  |  | b. Jumlah Delineator                                                                                                                                     | <b>Unit</b>          | <b>0</b>   |
|  |  | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                                              | <b>Unit</b>          | <b>350</b> |
|  |  | d. Jumlah APILL                                                                                                                                          | <b>Unit</b>          | <b>2</b>   |



|    |                                                                                          |                                                                                                                               |          |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|    |                                                                                          | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                               | Unit     | 400 |
|    |                                                                                          | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ( <i>Guard Rail</i> )                                                   | Unit     | 0   |
|    |                                                                                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan                                         | Kegiatan | 2   |
|    |                                                                                          | a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                                                                |          |     |
|    |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai,danau,dan penyeberangan | Lintas   | 0   |
|    |                                                                                          | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                              |          |     |
|    |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                              | Lintas   | 1   |
| 2. | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                      | Kegiatan | 1   |
|    |                                                                                          | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor            | Bulan    | 12  |
|    |                                                                                          | a. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran                                                                       |          |     |
|    |                                                                                          | b. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan                                                                         | Bulan    | 14  |

|  |  |                                                                                                          |                |          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A |                |          |
|  |  | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                 | <b>Laporan</b> | <b>1</b> |
|  |  | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                             | <b>Laporan</b> | <b>4</b> |

| <b>NO</b>    | <b>KEGIATAN</b>                                                                         | <b>ANGGARAN</b>       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>( 1 )</b> | <b>( 2 )</b>                                                                            | <b>( 3 )</b>          |
| <b>1.</b>    | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan                                             | <b>41.116.773.000</b> |
| <b>2.</b>    | Operasionalkan tipe A                                                                   | <b>57.220.567.000</b> |
| <b>3.</b>    | Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal Tipe A                                            | <b>35.000.000.000</b> |
| <b>4.</b>    | Operasional UPPKB                                                                       | <b>8.145.255.000</b>  |
| <b>5.</b>    | Pengadaan dan Pemasangan ATCS                                                           | <b>31.000.000.000</b> |
| <b>6.</b>    | Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | <b>3.855.000.000</b>  |

Semarang, November 2020

**Pihak Kedua**



**Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si**

**Pihak Pertama**



**EKO AGUS SUSANTO**  
Pembina – IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**  
**PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2020**

| <b>NO</b>    | <b>SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN</b>                        | <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                                                                                                                                       | <b>SATUAN</b> | <b>TARGET</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>( 1 )</b> | <b>( 2 )</b>                                            | <b>( 3 )</b>                                                                                                                                                                   | <b>( 4 )</b>  | <b>( 5 )</b>  |
| 1.           | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) |               |               |
|              |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                         | Lokasi        | 1             |
|              |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                        | Lokasi        | 1             |
|              |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                        | Lokasi        | 20            |
|              |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                              | Lokasi        | 10            |
|              |                                                         | 2. Tersusunnya evaluasi pengawasan Penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB )             | Kegiatan      | 1             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                               |                |          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|  |  | 3. Terlaksananya penerapan ZOSS,RASS dan pembatasan kecepatan / rencana penerapan sampai dengan tahun 2024<br>a. Jumlah Lokasi Pembangunan ZOSS (Kota/Kab)                                                                    | Lokasi         | 0        |
|  |  | b. Jumlah Lokasi Pembangunan RASS (Kota/Kab)                                                                                                                                                                                  | Lokasi         | 0        |
|  |  | 4. Tersusunnya evaluasi kalibrasi, peralatan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan dan industri karoseri.<br>a. Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kalibrasi alat uji kendaraan | Kota/Kab       | 38       |
|  |  | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor<br>a. Jumlah monitoring dan pengawasan sarana dan prasarana perhubungan darat                                               | Kegiatan       | 1        |
|  |  | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan,pemeliharaan dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan<br>a. Jumlah marka jalan                                                                  | M <sup>2</sup> | 8.950,38 |
|  |  | b. Jumlah Delineator                                                                                                                                                                                                          | Unit           | 150      |
|  |  | c. Jumlah Rambu Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                   | Unit           | 519      |
|  |  | d. Jumlah APILL                                                                                                                                                                                                               | Unit           | 21       |
|  |  | e. Jumlah Alat Penerangan Jalan                                                                                                                                                                                               | Unit           | 1010     |
|  |  | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ( Guard Rail )                                                                                                                                                          | Unit           | 0        |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |          |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|    |                                                                                          | 7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan<br>a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek                                                           | Kegiatan | 2  |
|    |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembangunan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai,danau,dan penyeberangan<br>a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil | Lintas   | 0  |
|    |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                                                                                  | Lintas   | 1  |
|    |                                                                                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                                                                          | Kegiatan | 1  |
| 2. | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor<br>a. Penyelenggaraan Administrasi dan Layanan Perkantoran     | Bulan    | 12 |
|    |                                                                                          | b. Penyelenggaraan Belanja Pegawai Termasuk Tunjangan                                                                                                                             | Bulan    | 14 |
|    |                                                                                          | 10.Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A                                                                           |          |    |

|  |  |                                                                    |         |   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|---------|---|
|  |  | a. Tersusunnya Bahan RKA                                           | Laporan | 1 |
|  |  | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP,<br>Laporan Tahunan dan<br>Profile BPTD | Laporan | 4 |

Semarang, Januari 2020

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH X PROVINSI JATENG DAN DIY**



**Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620806 198903 1 012



# RENCANA AKSI



**Tahun 2020**

Unit Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

**Wilayah X Provinsi Jawa Tengah -  
D.I Yogyakarta**



**RENCANA AKSI TAHUN 2020**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X**  
**PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| NO  | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                            | SATUAN | TARGET | KEGIATAN                                                                   | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ           |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|--------------|
|     |                                                         |                                                                                                                                                                              |        |        |                                                                            | TW I                | TW II | TW III | TW IV |              |
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                                                          | (4)    | (5)    | (6)                                                                        | (7)                 | (8)   | (9)    | (10)  | (11)         |
| 1.  | Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Darat | 1. Tersusunnya pembangunan, penvelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, Smart Terminal Terminal Barang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor ( UPPKB ) |        |        |                                                                            |                     |       |        |       |              |
|     |                                                         | a. Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Tipe A                                                                                                                                 | Lokasi | 1      | Pembangunan Terminal Tipe A Kab.Demak Tahap II                             |                     | √     | √      |       | Kasi Sarpras |
|     |                                                         | b. Jumlah Lokasi Rehabilitasi Terminal penumpang Tipe A                                                                                                                      | Lokasi | 2      | Rehabilitas Terminal Penumpang Tipe A Pekalongan , Terminal Tipe A Cilacap |                     | √     | √      |       | Kasi Sarpras |
|     |                                                         | c. Jumlah Pengoperasian Terminal Tipe A                                                                                                                                      | Lokasi | 20     | Fasilitas Operasional Terminal Tipe A                                      | √                   | √     | √      | √     | Kasi Sarpras |
|     |                                                         | d. Jumlah UPPKB yang dioperasikan                                                                                                                                            | Lokasi | 10     | Fasilitas Jembatan Timbang                                                 | √                   | √     | √      | √     | Kasi Sarpras |





| No | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                    | SATUAN         | TARGET   | KEGIATAN                                                          | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ           |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|--------------|
|    |                          |                                                                                                                                      |                |          |                                                                   | TW I                | TW II | TW III | TW IV |              |
|    |                          | 5. Tersusunnya bahan rencana pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi uji berkala kendaraan bermotor.                                   |                |          | Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat. | √                   | √     | √      | √     | Kasi Sarpras |
|    |                          | a. Jumlah Monitoring dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat                                                           | Kegiatan       | 1        |                                                                   |                     |       |        |       |              |
|    |                          | 6. Tersusunnya rencana pengelolaan, pengawasan, penyelenggaraan pemeliharaan, dan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan |                |          | Pengadaan dan pematangan perlengkapan jalan                       |                     | √     | √      |       | Kasi LLAJ    |
|    |                          | a. Jumlah Marka Jalan                                                                                                                | M <sup>2</sup> | 5.570.04 |                                                                   |                     |       |        |       |              |
|    |                          | b. Jumlah Delineator                                                                                                                 | Unit           | 0        |                                                                   |                     |       |        |       |              |
|    |                          | c. Jumlah rambu lalu lintas                                                                                                          | Unit           | 265      | Pengadaan dan pematangan perlengkapan jalan                       |                     | √     | √      |       | Kasi LLAJ    |
|    |                          | d. Jumlah APILL                                                                                                                      | Unit           | 16       | Pengadaan dan pematangan perlengkapan jalan                       |                     | √     | √      |       | Kasi LLAJ    |
|    |                          | e. Jumlah alat penerangan jalan                                                                                                      | Unit           | 510      | Pengadaan dan pematangan perlengkapan jalan                       |                     | √     | √      |       | Kasi LLAJ    |

|  |  |                                                                                                                                    |          |     |                                             |   |   |   |   |              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|
|  |  | f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan<br>( <i>Guard Rail</i> )                                                     | Unit     | 800 | Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan |   | √ | √ |   | Kasi<br>LLAJ |
|  |  | <del>7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap aturan pembatasan berat angkutan jalan</del><br>a. Sosialisasi BPTD dan Bimtek | Kegiatan | 2   | Bimtek dan Sosialisasi BPTD                 | √ | √ | √ | √ | Ka.TU        |

| No | SASARAN PROGRAM KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                              | SATUAN   | TARGET | KEGIATAN                            | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-----------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                |          |        |                                     | TW I                | TW II | TW III | TW IV |           |
|    |                                                                                          | 8. Tersusunnya pembenangan pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan |          |        |                                     |                     |       |        |       |           |
|    |                                                                                          | a. Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil                                                                               | Lintas   | 0      |                                     |                     |       |        |       |           |
|    |                                                                                          | b. Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis                                                                               | Lintas   | 1      |                                     |                     |       |        |       |           |
|    |                                                                                          | c. Jumlah monitoring dan pengawasan ASDP                                                                                       | Kegiatan | 1      | Monitoring & Pengawasan TSDP        | √                   | √     | √      | √     | Kasi ASDP |
| 2  | Meningkatkan Dukungan Sumber Daya dan Kelembagaan di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat | 9. Laporan pengelolaan urusan kepegawaian keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan ATK Kantor            |          |        |                                     |                     |       |        |       |           |
|    |                                                                                          | a. Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran                                                                        | Bulan    | 12     | Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi | √                   | √     | √      | √     | Ka.TU     |
|    |                                                                                          | b. Penyelenggaraan belanja pegawai termasuk tunjangan                                                                          | Bulan    | 14     | Pembayaran Gaji dan Tunjangan       | √                   | √     | √      | √     | Ka.TU     |

| No | SASARAN PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                        | SATUAN  | TARGET | KEGIATAN                                     | RENCANA PELAKSANAAN |       |        |       | PJ    |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
|    |                          |                                                                                                          |         |        |                                              | TW I                | TW II | TW III | TW IV |       |
|    |                          | 10. Tersusunnya bahan evaluasi dan monitoring kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A |         |        |                                              |                     |       |        |       |       |
|    |                          | a. Tersusunnya Bahan RKA                                                                                 | Laporan | 3      | Penyusunan Bahan Rencana Kerja & Anggaran    | √                   | √     | √      | √     | Ka.TU |
|    |                          | b. Tersusunnya SAKIP, SPIP, Laporan Tahunan dan Profile BPTD                                             | Laporan | 4      | Penyusunan SAKIP, SPIP, Lptah & Profile BPTD | √                   |       |        | √     | Ka.TU |

Semarang, Januari 2020

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH X PROVINSI JATENG DAN DIY



**Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE**

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19620806 198903 1 012



[Iklpm Fakulti Kediri](https://t.me/iklpm_fakulti_kediri)



[iklpm\\_fakulti\\_kediri](https://www.instagram.com/iklpm_fakulti_kediri)



[60196330000](https://wa.me/60196330000)



[fakultat.kediri@ups.edu.my](mailto:fakultat.kediri@ups.edu.my)